

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR: TANGGUNG JAWAB
PERUSAHAAN DALAM PASAR MODAL
LEGAL PROTECTION TOWARDS INVESTORS: COMPANY'S
RESPONSIBILITIES IN THE STOCK MARKET**

Michelle Marvella Santosa dan Veronica Advlin Agnesia

Universitas Pelita Harapan

Korespondensi Penulis : michellemarvella@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Santosa, Michelle Marvella dan Veronica Advlin Agnesia. *Perlindungan Hukum bagi Investor : Tanggung Jawab Perusahaan dalam Pasar Modal*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).

ABSTRAK

Pasar modal berperan penting dalam perekonomian sebagai sarana perusahaan memperoleh modal dan investor mengembangkan aset. Perlindungan hukum bagi investor menjadi aspek krusial untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas pasar. Artikel ini membahas peran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam melindungi investor melalui kewajiban keterbukaan informasi, tata kelola perusahaan yang baik, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, tanggung jawab perusahaan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dijelaskan sebagai upaya membangun kepercayaan investor dan menciptakan pasar modal yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pasar Modal, Perlindungan Hukum Investor, Tanggung Jawab Perusahaan

ABSTRACT

The capital market plays an important role in the economy as a means for companies to obtain capital and investors to develop assets. Legal protection for investors is a crucial aspect to maintain market confidence and stability. This article discusses the role of Law No. 8/1995 on Capital Markets in protecting investors through information disclosure obligations, good corporate governance, and dispute resolution mechanisms. In addition, the responsibility of companies in ensuring transparency and accountability is explained as an effort to build investor confidence and create a healthy, transparent and sustainable capital market.

Keywords: Capital Markets, Investor Legal Protection, Corporate Responsibility

A. PENDAHULUAN

Pasar modal dapat didefinisikan sebagai sistem atau mekanisme yang melalui perusahaan dapat mengumpulkan dana dari publik dengan menerbitkan sekuritas seperti saham dan obligasi. Dalam konteks yang lebih luas, Pasar Modal bertindak sebagai platform bagi investor untuk membeli dan menjual produk keuangan, menciptakan likuiditas dan memberi perusahaan kesempatan untuk menerima modal yang mereka butuhkan untuk berkembang dan berkembang. Selain itu, pasar modal memainkan peran penting dalam menentukan harga aset, alokasi sumber daya, dan memberikan informasi yang relevan kepada para peserta pasar mengenai situasi ekonomi dan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, pasar modal tidak hanya tempat perdagangan, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi umum.

Investor memainkan peran yang sangat penting dalam ekosistem pasar modal karena diperlukan untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan. Kehadiran investor tidak hanya menyediakan sumber daya keuangan, tetapi juga menciptakan dinamika pasar yang sehat. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi investor menjadi sangat penting dan penting untuk mempertahankan kepercayaan pada pasar. Tanpa perlindungan yang tepat, investor mungkin dapat ragu untuk berinvestasi. Ini dapat menghambat aliran modal dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Di sisi lain, tanggung jawab perusahaan dalam konteks pasar modal jauh lebih luas daripada manajemen dana yang diterimanya dari investor.

Perusahaan berkewajiban untuk memberi investor faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan, strategi bisnis, dan nilai investasi mereka dan memberikan informasi yang akurat, transparan, dan tepat waktu. Kewajiban ini mencakup memberikan gelar yang jelas, pengungkapan informasi zat, dan komunikasi yang terbuka dan jujur mengenai risiko yang mungkin terpapar oleh perusahaan. Dengan memenuhi tanggung jawab ini, kami tidak hanya melindungi kepentingan investor kami, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan pasar yang lebih transparan dan berkelanjutan.¹

¹ Fikri Septiansyah, *Penerapan Prinsip Transparansi dalam Restrukturisasi Organ Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU-BUMD) Kabupaten Kuningan dalam Perspektif Hukum Perusahaan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2022.

Perlindungan Hukum bagi Investor dalam tanggung jawab perusahaan dalam pasar modal, umumnya dengan banyaknya perusahaan memiliki banyak investor Pasar Modal memainkan peran penting dalam sektor keuangan karena Pasar Modal menawarkan alternatif baru untuk memperoleh sumber keuangan bisnis, menambahkan alternatif baru untuk investor yang berinvestasi di luar bank dan area perbankan, bank dan transaksi perbankan menambah bentuk investasi lainnya. Seperti yang disebutkan di atas, sudah dipengaruhi oleh faktor-faktor, sehingga berinvestasi di pasar modal lebih berisiko daripada investasi di sektor lain. Oleh karena itu, keputusan untuk memilih untuk berinvestasi di pasar modal harus dengan inspeksi yang cermat Undang-Undang Pasar Modal mengatur masalah kewajiban untuk memenuhi keterbukaan karena informasi diperhitungkan dalam investasi dan masalah kehilangan dan ancaman kejahatan untuk pemain pasar modal Kewajiban untuk tidak memenuhi kewajiban untuk tidak memenuhi prinsip keterbukaan sesuai dengan ketentuan hukum-hukum.

Perlindungan hukum bagi investor merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan terhadap pasar modal. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berfungsi sebagai landasan hukum yang komprehensif dan jelas, yang dirancang untuk melindungi kepentingan para investor. Undang-undang ini tidak hanya menetapkan aturan dan regulasi yang harus diikuti oleh perusahaan yang terdaftar di pasar modal, tetapi juga memberikan jaminan bahwa hak-hak investor akan dihormati dan dilindungi.

Salah satu komponen utama dari perlindungan hukum ini adalah hak-hak investor untuk memperoleh informasi yang relevan, akurat, dan transparan mengenai perusahaan tempat mereka menanamkan modal. Informasi ini mencakup laporan keuangan, pengumuman material,² 40serta perkembangan penting lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. Dengan adanya akses terhadap informasi yang jelas dan tepat waktu, investor dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi, sehingga mengurangi risiko kerugian yang mungkin mereka hadapi.

² Hapzi Ali dan Farhan Saputra, *Pengaruh Transparan, Akuntabilitas dan Tanggung Jawab terhadap Good Corporate Governance*, Jurnal Ilmu Multidisplin, Vol.2, No.2 (Juli 2023), p.130–39, <https://doi.org/10.38035/jim.v2i2.248>.

Selain itu, undang-undang ini juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh investor jika mereka mengalami pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Mekanisme ini mencakup prosedur untuk mengajukan keluhan, mediasi, dan arbitrase, yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara investor dan perusahaan secara adil dan efisien. Dengan adanya jalur penyelesaian sengketa yang jelas, investor merasa lebih aman dan terlindungi, karena mereka tahu bahwa ada langkah-langkah yang dapat diambil untuk menegakkan hak-hak mereka jika terjadi masalah. Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi investor yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan investasi yang aman, transparan, dan berkelanjutan.

Perusahaan yang terdaftar di pasar modal memiliki tanggung jawab yang sangat penting dan kompleks untuk mematuhi berbagai regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK sebagai lembaga pengawas dan regulator pasar modal di Indonesia bertugas untuk memastikan bahwa semua praktik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta menjaga integritas dan transparansi pasar. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan terhadap prinsip-prinsip good corporate governance yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial.

Salah satu aspek utama dari tanggung jawab ini adalah kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Laporan keuangan ini harus disusun dengan standar akuntansi yang berlaku dan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk mengungkapkan informasi material yang dapat mempengaruhi keputusan investasi para pemegang saham dan calon investor. Informasi material ini mencakup berbagai hal, seperti perubahan signifikan dalam manajemen, perolehan kontrak besar, risiko yang dihadapi perusahaan, serta faktor-faktor lain yang dapat berdampak pada kinerja dan nilai saham perusahaan. Dengan memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata investor.

Namun, apabila perusahaan gagal dalam memenuhi tanggung jawab tersebut, maka konsekuensinya bisa sangat serius. Adapun kegagalan untuk menyampaikan laporan keuangan yang akurat atau mengungkapkan informasi material dapat mengakibatkan sanksi hukum yang berat, termasuk dalam hal ini denda, pencabutan izin usaha, atau bahkan tindakan pidana terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, ketidakpatuhan ini dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi investor, yang mungkin membuat keputusan investasi berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan. Kerugian ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pasar modal secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemenuhan tanggung jawab ini sangat penting untuk menciptakan ekosistem pasar modal yang sehat, transparan, dan berkelanjutan, di mana semua pihak dapat beroperasi dengan aman dan percaya diri.

Perlindungan hukum investor adalah pilar utama mempertahankan kepercayaan dan stabilitas pasar modal. Tanggung jawab perusahaan publik tidak hanya terbatas pada laba, tetapi juga mencakup kewajiban untuk memberikan investor ketepatan waktu yang akurat dan transparan. Melanggar prinsip-prinsip ini dapat merusak investor dan merusak integritas pasar modal secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan sanksi ketat terhadap bisnis yang melanggar aturan untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, untuk memahami mekanisme perlindungan hukum yang lebih terperinci untuk investor dan perusahaan dapat memenuhi tanggung jawab pasar modal mereka, kami memiliki berbagai opsi dari rumusan masalah sangat berkorelasi dengan bagian-bagian dalam naskah, meliputi poin dalam pembahasan :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal di Indonesia?
2. Apa saja tanggung jawab perusahaan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas di pasar modal?

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal di Indonesia

Fungsi hukum dalam masyarakat bersifat kompleks dan beraneka ragam, terutama sebagai sarana mengatur interaksi sosial, hukum menyediakan seperangkat pedoman atau norma yang mengatur perilaku individu dan kelompok, termasuk apa yang diizinkan dan dilarang.³ Tujuannya adalah untuk menciptakan tatanan sosial yang teratur dan teratur, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat berlangsung harmonis, tanpa kekacauan atau ketidakpastian. Tanpa hukum, interaksi sosial cenderung ditandai oleh konflik dan kekacauan, yang pada akhirnya menghambat kemajuan dan kesejahteraan bersama hukum tidak hanya mengatur interaksi sosial tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan asas fundamental yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat secara ekonomi, politik, dan sosial.

Hukum diharapkan dapat menjamin distribusi hak dan tanggung jawab yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau dikecualikan. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya memiliki fungsi represif (memberikan sanksi kepada pelanggar hukum) tetapi juga fungsi preventif (mencegah pelanggaran hukum) dan fungsi distributif (mendistribusikan sumber daya secara adil). Lebih jauh lagi, hukum juga berperan sebagai penggerak pembangunan Dalam konteks pembangunan nasional, hukum dapat menjadi instrumen untuk mendorong kemajuan sosial ke arah yang lebih modern dan berkelanjutan. Misalnya, hukum dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui peraturan yang mendukung investasi, melindungi lingkungan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dengan demikian, hukum bertindak tidak hanya sebagai instrumen pengendalian tetapi juga sebagai alat progresif untuk mewujudkan perubahan positif dalam masyarakat. Hukum juga merupakan seperangkat aturan yang mengatur masyarakat dan tujuan utamanya adalah menyelesaikan perselisihan.

³ Arif Sugitanata, *Hukum Progresif dalam Lensa Sajipto Rahardjo*, diakses dari <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/764/hukum-progresif-dalam-lensa-sajipto-rahardjo>, diakses pada 02 April 2025.

Dalam kehidupan bermasyarakat, konflik tidak dapat dihindari karena setiap individu maupun kelompok mempunyai perbedaan kepentingan, nilai, dan pandangan konflik tidak dapat dihindari sepenuhnya, tetapi hukum ada untuk bertindak sebagai mekanisme untuk mengelola dan meminimalkan dampaknya. Tanpa hukum, konflik dapat meningkat menjadi kekacauan dan merugikan semua orang yang terlibat serta hukum berperan sebagai arbiter yang adil untuk menyelesaikan perselisihan dan menjamin masing-masing pihak memperoleh haknya.

Jika hukum tidak berfungsi secara efektif dalam masyarakat, maka tujuan hukum itu sendiri tidak akan tercapai. Fungsi hukum yang ideal adalah menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat. Namun untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan beberapa syarat, antara lain penegakan hukum yang konsisten, partisipasi aktif masyarakat, dan sistem hukum yang transparan dan akuntabel serta tanpa dukungan lintas partai, undang-undang tersebut hanya akan terdiri dari peraturan tertulis yang tidak memiliki dampak praktis pada kehidupan sehari-hari. Dengan adanya fungsi hukum yang dapat diimplementasikan secara baik serta memberikan dampak yang baik jika dilakukan secara benar.

Pasar modal merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional dan memerlukan landasan hukum yang kuat agar dapat secara optimal melindungi hak dan kepentingan investor, baik dalam negeri maupun asing. Perlindungan hukum ini dimaksudkan tidak hanya untuk merangsang minat investor tetapi juga untuk meminimalkan risiko penipuan, manipulasi pasar, dan praktik tidak sehat lainnya yang dapat merugikan investor dan memengaruhi stabilitas pasar. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang paling penting adalah adanya peraturan perundang-undangan yang komprehensif dan jelas. Di Indonesia, Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan terkait seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi dasar hukum bagi seluruh kegiatan di pasar modal. Peraturan tersebut mencakup ketentuan tentang transparansi informasi, tata kelola perusahaan yang baik dan pengawasan, serta mekanisme penegakan hukum.

Misalnya, emiten (perusahaan yang menawarkan saham kepada publik) diharuskan untuk memberikan laporan keuangan secara teratur dan akurat untuk memungkinkan investor mengambil keputusan berdasarkan informasi yang valid dan terkini. Perlindungan hukum bagi investor di pasar modal Indonesia didasarkan pada serangkaian peraturan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi yang aman, adil, dan transparan. Landasan hukum utamanya adalah Undang-Undang Pasar Modal No 8 Tahun 1995, yang mengatur kewajiban emiten untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu serta melarang manipulasi pasar dan praktik perdagangan orang dalam.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator telah menerbitkan berbagai ketentuan teknis, seperti POJK No 17/POJK04/2020 tentang perdagangan oleh pemegang informasi orang dalam dan POJK No 21/POJK04/2015 tentang tata kelola perusahaan yang baik. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga memiliki peraturan untuk memastikan transparansi dan kewajaran dalam perdagangan efek. Perlindungan hukum tersebut diperkuat dengan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)⁴ yang diatur melalui Peraturan OJK No.1. Hal ini juga mendapat dukungan dari POJK No 1/POJK/07/2014 dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur mengenai pengelolaan perusahaan. Meskipun kerangka hukum ini relatif komprehensif, tantangan tetap ada dalam implementasinya. Penegakan hukum yang kurang optimal seringkali menjadi kendala karena proses yang lambat dan tidak konsisten, sehingga merusak kepercayaan investor. Lebih jauh lagi, rendahnya literasi keuangan di masyarakat menyebabkan banyak investor individu rentan terhadap penipuan dan investasi palsu.

Perkembangan teknologi seperti platform investasi daring dan maraknya aset *crypto*⁵ perlu regulasi yang lebih adaptif dan responsif. Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum, edukasi masyarakat, dan penyesuaian regulasi dengan tren terkini menjadi kunci dalam memperkuat perlindungan hukum bagi investor.

⁴ Insan Khamil, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Bapmi*, diakses dari <https://www.kompasiana.com/insankhamil011/5b02f7c9caf7db69cb087354/mekanisme-penyelesaian-sengketa-melalui-bapmi>, diakses pada 02 April 2025.

⁵ Bayu Surya Purnama, *Panduan Lengkap Regulasi Kripto di Indonesia Untuk Investor*, diakses dari <https://www.mobee.io/mobee-academy/blog/regulasi-kripto-di-indonesia>, diakses pada 02 April 2025.

Selanjutnya, sebagai regulator pasar modal, OJK berperan penting dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku oleh seluruh pihak yang terlibat di pasar modal OJK berwenang melakukan penyidikan, mengenakan sanksi administratif, dan merujuk perkara pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi tindak pidana. Mekanisme pengendalian ini ditujukan untuk mencegah terjadinya kegiatan perdagangan orang dalam, manipulasi harga, atau penyebaran informasi menyesatkan yang dapat menimbulkan kerugian bagi investor perlindungan hukum juga dipastikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien Investor yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) atau Pengadilan Umum Sebagai organisasi penyelesaian sengketa alternatif, BAPMI dirancang untuk memungkinkan sengketa diselesaikan dengan cepat dan profesional tanpa prosedur pengadilan yang panjang dan rumit. Hal ini memberikan kepastian hukum kepada investor bahwa hak-hak mereka akan dilindungi bahkan jika terjadi pelanggaran.

Hal penting, meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang relatif lengkap, beberapa tantangan masih ada dalam implementasinya. Pertama, penegakan hukum yang buruk sering kali menjadi kendala meskipun aturannya jelas, penagakannya dapat lambat dan tidak konsisten, yang menyebabkan hilangnya kepercayaan investor. Kedua, rendahnya kesadaran hukum dan literasi keuangan di masyarakat juga menjadi kendala banyak investor, terutama investor individu, belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya saat berinvestasi dan berisiko menjadi korban penipuan atau investasi palsu. Pada saat yang sama, perkembangan teknologi dan digitalisasi pasar modal juga membawa tantangan baru, maraknya platform investasi daring dan aset *crypto* menuntut regulasi yang lebih adaptif dan responsif OJK harus terus memperbarui peraturan untuk mengantisipasi risiko baru yang muncul seiring perkembangan teknologi sekaligus memastikan bahwa investor terlindungi secara memadai.⁶

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto*, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-27-2024-AKD-AK.aspx>, diakses pada 02 April 2025.

Secara keseluruhan, kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyediaan perlindungan hukum bagi investor di pasar modal Indonesia.⁷ Namun upaya lebih lanjut masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Ini termasuk meningkatkan kualitas penegakan hukum, mendidik masyarakat, dan menyesuaikan peraturan dengan tren terkini. Oleh karena itu, pasar modal Indonesia diharapkan berkembang menjadi wahana investasi yang aman, transparan, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Tanggung Jawab Perusahaan dalam Memastikan Transparansi dan Akuntabilitas di Pasar Modal

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam pasar modal yang berperan penting dalam membangun kepercayaan investor dan menjaga integritas pasar. Tanggung jawab perusahaan dalam memastikan kedua aspek ini mencakup beberapa elemen kunci. Pertama, perusahaan harus menyampaikan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu melalui laporan keuangan dan menyebarkan materi informasi. Kedua, perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas, harus menjadi prioritas, dengan kebijakan yang adil dalam pengambilan keputusan. Ketiga, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk struktur organisasi yang jelas dan tugas yang terdefinisi, sangat penting untuk menjamin akuntabilitas.⁸ Selain itu, perusahaan wajib mematuhi peraturan yang berlaku dan melakukan audit secara berkala untuk memastikan kepatuhan. Komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan dan pelaporan yang transparan mengenai kinerja serta risiko yang dihadapi juga merupakan bagian integral dari tanggung jawab perusahaan. Dengan tanggung jawab memenuhi tanggung jawab ini, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan kepercayaan investor tetapi juga memberikan kontribusi pada stabilitas dan kepuasan pasar modal secara keseluruhan.

⁷ Pjilipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian yang penting dalam tata kelola suatu perusahaan untuk memastikan sebuah perusahaan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip. Melalui peraturan yang mengatur pelaporan keuangan, audit, pengungkapan informasi, dan tanggung jawab direksi serta manajemen, hukum membantu menciptakan lingkungan bisnis yang jujur dan terbuka. Tata kelola perusahaan bertujuan memastikan bahwa sebuah perusahaan dikelola dengan baik sehingga meningkatkan kualitas dari suatu perusahaan (meningkatkan nilai perusahaan), menjaga kepercayaan. Yang artinya tata kelola bertujuan mendorong perkembangan sebuah perusahaan, meningkatkan kepercayaan investor, meningkatkan kinerja dan daya saing suatu perusahaan, serta mengelola sumber daya secara baik, efisien, dan efektif.

Akuntabilitas manajemen dapat diperkuat melalui mekanisme hukum, bertujuan memastikan bahwa setiap pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Dengan demikian, hukum menjamin keberlangsungan perusahaan yang sehat dan berintegritas.

a. Prinsip Transparansi

Hukum Perusahaan Dalam prinsip ini perusahaan tetap menjaga keamanan data pribadi (privasi) petinggi suatu peraturan perusahaan yang berlaku, Prinsip transparansi perusahaan dalam hal ini merupakan prinsip keterbukaan dalam pengambilan keputusan, serta kepastian informasi terkait visi misi perusahaan, tujuan perusahaan, struktur dan kompensasi *management*. Prinsip transparansi ini bertujuan untuk membangun kepercayaan investor antar perusahaan dan pemegang saham dalam pengelolaan tata usaha perusahaan untuk meningkatkan perusahaan. Prinsip transparansi diatur oleh undang-undang No 40 Tahun 2007.⁹ Transparansi merupakan keterbukaan informasi terhadap semua orang yang berkepentingan sehingga transparansi berkaitan dengan akses informasi, pengungkapan informasi, keterbukaan pengelolaan resiko.

⁹ Nurul Imamah, *Analisis Prinsip Transparansi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014*, UQUDUNA Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, Vol.1, No1 (2023).

Prinsip transparansi ini diatur dalam . Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal: Mengatur bahwa perusahaan yang terdaftar di bursa wajib untuk mengungkapkan informasi yang material dan relevan kepada publik agar tercipta pasar modal yang sehat dan transparan. Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK): OJK mengeluarkan beberapa regulasi yang mewajibkan perusahaan publik untuk melakukan pengungkapan informasi material dan berkala, seperti POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas hukum perusahaan tekanan tanggung jawab perusahaan untuk menjalankan operasionalnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, perusahaan diwajibkan untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional, dan melibatkan transparansi dalam laporan keuangan serta keputusan bisnis. Selain itu, perusahaan juga harus mempertanggungjawabkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya, menjaga hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan, serta menyediakan mekanisme penyelesaian yang adil. Dengan demikian, akuntabilitas hukum memastikan bahwa perusahaan bertindak secara etis dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya meningkatkan kredibilitas dan mengurangi risiko hukum yang dapat menguntungkan. Prinsip ini merupakan sebuah kewajiban seseorang yang berwenang memberikan laporan aktivitas perusahaan dan kinerja secara rutin, yang bertujuan setiap tanggung jawab masing-masing pihak dilakukan secara baik dan benar untuk mencapai suatu target tertentu. Akuntabilitas ini menganut prinsip kebertanggung jawaban, mempertanggung jawaban kinerja para pihak kepada pihak yang berkenan.

Dalam prinsip akuntabilitas ini memiliki dua jenis prinsip yaitu vertikal dan horizontal. akuntabilitas vertikal ini biasanya mengarah pada tata kelola bidang dana perusahaan.¹⁰ Dan akuntabilitas ini berfokus pada manfaat ke masyarakat terhadap layanan organisasinya.¹¹ Melalui peraturan tentang pengungkapan informasi, UU mempromosikan transparansi, begitu informasi penting tentang kinerja dan keuangan Perusahaan jelas dapat diakses oleh pemegang saham dan publik. Kewajiban untuk menjelaskan tata kelola perusahaan melalui mekanisme hukum yang memungkinkan sanksi bagi mereka yang melanggar Dengan peraturan yang jelas, Perusahaan Hukum mendorong pemerintah yang baik untuk bersatu untuk memastikan bahwa investor dan pemangku kepentingan memiliki kepentingan kepercayaan

C. PENUTUP

Perlindungan hukum bagi investor di pasar modal Indonesia merupakan elemen penting dalam menjaga integritas dan stabilitas pasar. Perlindungan ini diwujudkan melalui kerangka hukum yang komprehensif, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berbagai regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Regulasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa investor memperoleh informasi yang akurat, relevan, dan transparan sehingga dapat membuat keputusan investasi secara bijak dan mengurangi risiko kerugian. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia dapat terus terjaga, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional.

Di sisi lain, perusahaan yang terdaftar di pasar modal memiliki tanggung jawab penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas. Tanggung jawab tersebut meliputi penyampaian informasi keuangan secara berkala dan akurat, pengungkapan informasi material, serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kegagalan perusahaan dalam memenuhi

¹⁰ Adianto Asdi Sangki, *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)*, Jurnal Eksekutif, Vol.1, No.1 (2017).

¹¹ Muhammad Fikri Haikal, *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan E-KTP di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar)*, Jurnal Administrasi Negara, Vol.28, No.1 (April 2022).

tanggung jawab ini dapat mengakibatkan sanksi hukum, merusak kepercayaan investor, dan berdampak negatif terhadap stabilitas pasar modal. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan kualitas tata kelola dan transparansi dalam operasionalnya, sementara OJK diharapkan terus memperkuat penegakan hukum dan memperbarui regulasi seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi. Dengan demikian, pasar modal Indonesia diharapkan dapat menjadi wahana investasi yang aman, berkelanjutan, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadjon, Pjilipus M.. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu).

Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).

Publikasi

Ali, Hapzi dan Farhan Saputra. *Pengaruh Transparan, Akuntabilitas dan Tanggung Jawab terhadap Good Corporate Governance*. Jurnal Ilmu Multidisplin. Vol.2. No.2 (Juli 2023).

Haikal, Muhammad Fikri. *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan E-KTP di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar)*. Jurnal Administrasi Negara. Vol.28. No.1 (April 2022).

Imamah, Nurul. *Analisis Prinsip Transparansi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014*. UQUDUNA Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah. Vol.1. No1 (2023).

Sangki, Adianto Asdi. *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)*. Jurnal Eksekutif. Vol.1. No.1 (2017).

Karya Ilmiah

Septiansyah, Fikri. 2022. *Penerapan Prinsip Transparansi dalam Restrukturisasi Organ Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU-BUMD) Kabupaten Kuningan dalam Perspektif Hukum Perusahaan*. Skripsi. (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

Website

Khamil, Insan. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Bapmi*. diakses dari <https://www.kompasiana.com/insankhamil011/5b02f7c9caf7db69cb087354/mekanisme-penyelesaian-sengketa-melalui-bapmi>. diakses pada 02 April 2025.

Otoritas Jasa Keuangan. *Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto*. diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-27-2024-AKD-AK.aspx>. diakses pada 02 April 2025.

Purnama, Bayu Surya. *Panduan Lengkap Regulasi Kripto di Indonesia Untuk Investor*. diakses dari <https://www.mobee.io/mobee-academy/blog/regulasi-kripto-di-indonesia>. diakses pada 02 April 2025.

Sugitanata, Arif. *Hukum Progresif dalam Lensa Sajipto Rahardjo*. diakses dari <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/764/hukum-progresif-dalam-lensa-satjipto-rahardjo>. diakses pada 02 April 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK/07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Michelle Marvella Santosa, Veronica Advlin Agnesia
Perlindungan Hukum bagi Investor : Tanggung Jawab Perusahaan dalam Pasar Modal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bursa Efek Indonesia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK04/2020 tentang Perdagangan Oleh Pemegang Informasi Orang Dalam.